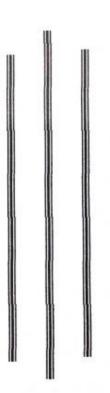


PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 54 TAHUN 2022

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN ,KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022

# BUPATI SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

# PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 54 TAHUN 2022

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBAWA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA,

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanakkanak (TK) Negeri dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Sumbawa. terdapat penambahan 5 (lima) Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

- Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Pendidikan Daerah Bidang Perangkat Negara Republik Indonesia Kebudayaan (Berita Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah Pendidikan Menteri Peraturan dengan Tahun 2018 16 Kebudayaan Nomor Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12
  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
  Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran
  Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12,
  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
  Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah
  terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
  Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
  Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
  Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah
  Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2,
  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
  Nomor 694);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBAWA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbagi dalam berbagai wilayah sebagai berikut :

#### c. Kecamatan Batulanteh, terdiri atas:

- 1. Sekolah Dasar, terdiri atas:
  - a) Sekolah Dasar Negeri 1 Baturotok Kecamatan Batulanteh;
  - b) Sekolah Dasar Negeri 2 Baturotok Kecamatan Batulanteh;
  - c) Sekolah Dasar Negeri 3 Baturotok Kecamatan Batulanteh;
  - d) Sekolah Dasar Negeri Baodesa Kecamatan Batulanteh;
  - e) Sekolah Dasar Negeri Batubara Kecamatan Batulanteh-
  - f) Sekolah Dasar Negeri Batudulang Kecamatan Batulanteh';
  - g) Sekolah Dasar Negeri Fajar Bakti Kecamatan Batulanteh;
  - h) Sekolah Dasar Negeri Kaduk Kecamatan Batulanteh;
  - i) Sekolah Dasar Negeri Kelungkung Kecamatan Batulanteh;
  - j) Sekolah Dasar Negeri Ladan Kecamatan Batulanteh;
  - k) Sekolah Dasar Negeri Musuk Kecamatan Batulanteh;
  - 1) SekoJah Dasar Negeri Punik Kecamatan Batulanteh;
  - m) Sekolah Dasar Negeri Pusu Kecamatan Batulanteh;
  - n) Sekolah Dasar Negeri Riu Kecamatan Batulanteh;
  - o) Sekolah Dasar Negeri Sampang Balu Kecamatan Batulanteh;
  - p) Sekolah Dasar Negeri Sampar Kuang Rea Kecamatan Batulanteh;
  - q) Sekolah Dasar Negeri Semongkat Kecamatan Batulanteh;
  - r) Sekolah Dasar Negeri Semongkat Sampar Kecamatan Batulanteh;
  - s) Sekolah Dasar Negeri Sukamaju Kecamatan Batulanteh;
  - t) Sekolah Dasar Negeri Tangkampulit Kecamatan Batulanteh; dan
  - u) Sekolah Dasar Negeri Tepal Kecamatan Batulanteh.
- 2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
  - a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1Batulanteh Kecamatan Batulanteh;
  - b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Batulanteh Kecamatan Batulanteh;
  - c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Batulanteh Kecamatan Batulanteh;
  - d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Batulanteh Kecamatan Batulanteh; dan

e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satu Atap Batulanteh Kecamatan Batulanteh.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

> Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 28 April 2022

Melen

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 28 April 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR

54